



UNIVERSITAS INDONESIA

ALOKASI DANA DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KESESUAIANNYA DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007

TESIS

NAMA : ERLINA HARTANTI
NPM : 0706306163

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN DAN
KEBIJAKAN PUBLIK

JAKARTA
JULI 2010



UNIVERSITAS INDONESIA

ALOKASI DANA DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KESESUAIANNYA DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi (ME)

NAMA : ERLINA HARTANTI
NPM : 0706306163

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

JAKARTA
JULI 2010

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Erlina Hartanti

NPM : 0706306163

Tanda Tangan :

Tanggal :

PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Erlina hartanti
NPM : 0706306163
Program Studi : Manajemen Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Alokasi Dana Dekonsentrasi Kementerian Pendidikan Nasional Kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

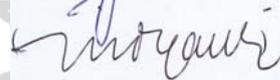
Pembimbing : RH Achmadi SE, M.Soc.Sc



Penguji : Prof. Sulastrisurono, PhD



Penguji : Widyanti Soetjipto SE, M.Soc.Sc



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 22 Juli 2010

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Hirobbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang karena rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sangat saya sadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, tidaklah mudah bagi saya untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

Bapak Ringoringo H. Achmadi, SE., M.Soc.Sc selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dan membantu saya dalam penyusunan tesis ini; Terima kasih juga untuk mami, mas Dindin, Fanny, Gandhi dan Casey untuk doa dan dukungannya yang tiada henti. Untuk teman-teman dari Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, Bapak Yudie Wahyu dan mas Tora; Bapak Ardiansyah dari Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, serta teman-teman Deputi IV BPKP, PE mas Adi, pak Taufik, terima kasih atas data dan waktu yang diberikan untuk berdiskusi. Tak lupa untuk teman-teman di sekretariat MPKP, mas Triman, mas Haris, untuk informasi dan dukungannya, teman-teman MPKP angkatan XVIII, serta teman-teman lain yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, walaupun sudah banyak pihak yang membantu. Untuk itu segala kekurangan yang ada pada tesis ini merupakan tanggung jawab saya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. InsyaAllah tesis ini membawa manfaat bagi kita semua, amiin.

Cimanggis, 9 Juli 2010

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erlina Hartanti
NPM : 0706306163
Program Studi : Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen : Ekonomi keuangan Negara dan Daerah.
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Alokasi Dana Dekonsentrasi
Kesesuaiannya dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

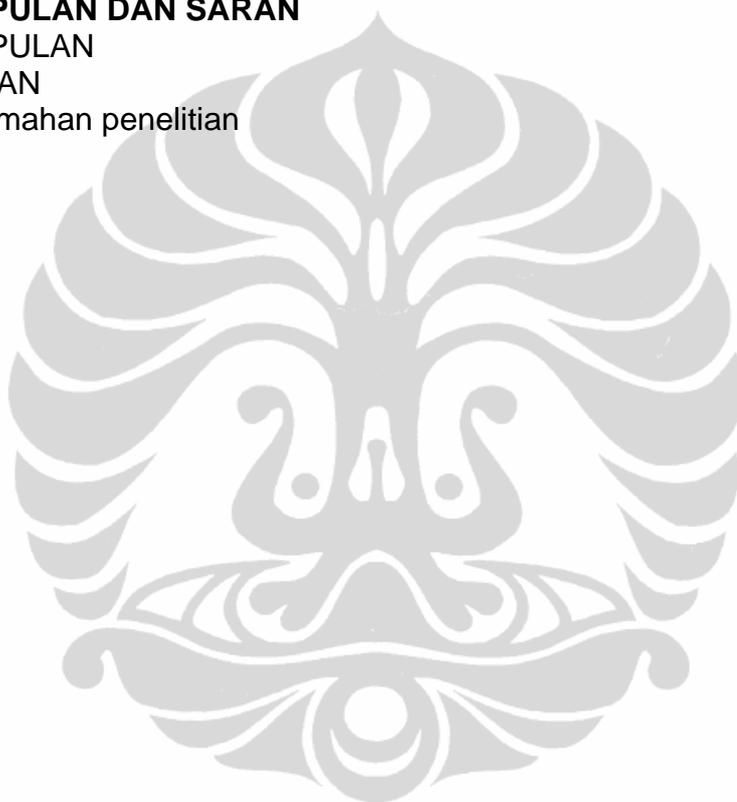
Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Juli 2010
Yang menyatakan

(Erlina Hartanti)

DAFTAR ISI

Lembar pengesahan	li
Kata pengantar	lii
Lembar persetujuan publikasi karya ilmiah	lv
Abstrak	v
Daftar table	viii
Daftar gambar	lx
Daftar lampiran	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Ruang lingkup/ Batasan Penelitian	13
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Manfaat Penelitian	13
1.6 Metodologi Penelitian	14
1.7 Kerangka berpikir Pemecahan Masalah	15
1.8 Sistematika Penulisan	18
2 KONSEP DEKONSENTRASI DALAM TEORI DAN PENERAPAN	19
2.1 Dekonsentrasi hubungannya dengan desentralisasi	19
2.2 Pengertian Dekonsentrasi	21
2.3 Kebijakan dekonsentrasi di negara lain	25
2.2 Penerapan Dekonsentrasi di negara lain	31
3 DANA DEKONSENTRASI DI INDONESIA	34
3.1 Sejarah dekonsentrasi di Indonesia	34
3.2 Konsep dan pengertian dekonsentrasi di Indonesia	36
3.3 Peraturan-peraturan dekonsentrasi di Indonesia	37
3.4 Konsep Dekonsentrasi di Indonesia kaitannya dengan di Negara lain	50
3.5 Kebijakan Pendidikan di Indonesia dan dinegara lain	55
3.6 Alokasi dana Dekonsentrasi di Indonesia tahun 2005-2009	57

4.	DANA DEKONSENTRASI DI PENDIDIKAN DASAR MENENGAH	61
4.1	Alokasi dana dekonsentrasi Kementerian Pendidikan Nasional	61
4.2	Alokasi dana dekonsentrasi Ditjen Mandikdasmen	64
4.3	Dana Dekonsentrasi kesesuaiannya dengan Renstra 2005-2009 Kementerian	69
4.4	Alokasi dana dekonsentrasi, kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007	79
5	SIMPULAN DAN SARAN	83
5.1	SIMPULAN	83
5.2	SARAN	89
5.3	Kelemahan penelitian	89



DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1.1.3	Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan dalam APBN Periode 2005-2009	8
2.2.1	Jenis Desentralisasi	23
2.2.2	Jenis desentralisasi & sifatnya	24
2.3.1	Type keputusan yang mungkin didesentralisasikan	30
3.2.1	Pengertian dekonsentrasi dan tugas pembantuan menurut undang-undang	36
3.3.1	Pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan berdasarkan PP nomor 38 tahun 2007	39
3.4.1	Gambaran perbedaan pengertian dan penerapan dekonsentrasi di Indonesia dan di Negara lain	54
3.4.1.a	Klasifikasi desentralisasi dan dekonsentrasi	54
3.4.1.b	Pengertian dekonsentrasi	54
3.4.1.c	Pendanaan dekonsentrasi	54
3.4.1.d	Penerapan dana dekonsentrasi	54
3.6.1	Perbandingan Alokasi Dana Dekonsentrasi Kementerian Diknas terhadap dana dekonsentrasi Nasional	58
3.6.2	Alokasi Dana Dekonsentrasi per Kementerian/Lembaga	59
4.1.1	Skenario Pendanaan Pendidikan Nasional tahun 2005-2009	62
4.1.2	Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan dalam APBN Periode 2005-2009	63
4.1.3	Perbandingan alokasi belanja pendidikan dan dana dekonsentrasi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2005-2009	65
4.2.1	perbandingan alokasi dana dekonsentrasi Mandikdasmen dengan Dana dekonsentrasi Nasional	71
4.2.2	Alokasi dana Dekonsentrasi Ditjen Mngt Dikdasmen, 33 Provinsi	72
4.3.1	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk empat program di Mandikdasmen pada tahun 2009	75
4.4.1	Pembagian urusan pemerintahan berdasarkan PP Nomor 38 tahun 2007	79
4.4.2	Perbandingan Kegiatan dekonsentrasi Ditjen Mandikdasmen terhadap Pembagian urusan Pemerintahan	81

DAFTAR GRAFIK

Grafik/gambar	Uraian	Halaman
1.7	Bagan Kerangka Pemikiran	17
3.3.1	Pembagian urusan pemerintahan	37
3.4.1	Pelaksanaan wewenang pemerintah	51
3.6.1	Alokasi dana dekonsentrasi nasional per provinsi	56
3.6.2	Alokasi dana dekonsentrasi per kementerian/lembaga	60
3.6.3	Perbandingan alokasi dana dekonsentrasi Kementerian terhadap alokasi dana dekonsentrasi nasional	51
4.1.1	Persentase alokasi belanja pendidikan terhadap Belanja Negara tahun 2005-2009	63
4.1.2	Alokasi dana dekonsentrasi Kementerian Diknas per provinsi	64
4.1.3	Trend dana dekonsentrasi Kementerian Diknas	64
4.1.4	Persentase Alokasi Dana Dekonsentrasi Kementerian Pendidikan Nasional terhadap Belanja pendidikan	65
4.1.5	Perbandingan Alokasi Dana Dekonsentrasi Kementerian Pendidikan Nasional dan Belanja pendidikan.	66
4.1.6	Perbandingan persentase alokasi dana dekonsentrasi Kementerian pendidikan Nasional terhadap alokasi Belanja Negara dan persentase Belanja Pendidikan terhadap Belanja Negara.	68
4.1.7	PAD Provinsi dan Alokasi Dana Dekonsentrasi Provinsi tahun 2009	69
4.2.1	Alokasi dana dekonsentrasi Mandikdasmen per provinsi 2006-2009	70
4.2.2	Alokasi dana dekonsentrasi Ditjen Mandikdasman per program tahun 2006-2009	72
4.3.1	Alokasi dana dekonsnetrasi Ditjen Mandikdasmen tahu per program per provinsi	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Uraian	Halaman
1	Pengertian Desentralisasi dan dekonsentrasi menurut para ahli	97-99
2	Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan berdasarkan PP Nomor 38 tahun 2007	100-106
3	Rekapitulasi program/kegiatan Dana dekonsentrasi Kementerian Diknas tahun 2009	107-109
4	Perbandingan alokasi dana dekonsentrasi Ditjen Mandikdasmen tahun 2009 dengan Pembagian urusan pemerintah berdasarkan PP Nomor 38 tahun 2007	110-111
3	Perbandingan alokasi dana dekonsentrasi Ditjen Mandikdasmen tahun 2009 dengan Pembagian urusan pemerintah berdasarkan PP Nomor 38 tahun 2007	112-113
4	Alokasi dana dekonsentrasi Nasional tahun 2005-2009	114-115
5	Alokasi dana dekonsentrasi kementerian/lembaga tahun 2005-2009	116
6	Alokasi dana dekonsentrasi Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2005-2009	117
7	Alokasi dana dekonsentrasi Ditjen Mandikdasmen tahun 2005-2009	118
8	Alokasi dana dekonsentrasi Mandikdasmen per program	119
10	SOP Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian/Lembaga	120
11	Peta kapasitas fiskal provinsi	121

ABSTRAK

Nama : Erlina Hartanti
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Alokasi Dana Dekonsentrasi Kementerian Pendidikan Nasional
Kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Tesis ini membahas tentang alokasi dana dekonsentrasi Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2009 dan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, dengan mengumpulkan dan menganalisa data alokasi dana dekonsentrasi nasional, kementerian sampai pelaksanaan program dan kegiatannya serta keterkaitannya dengan urusan pemerintah bidang pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana dekonsentrasi belum dialokasikan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2007, yaitu membantu pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat di daerah. Untuk itu, terkait dengan berkurangnya kewenangan pemerintah pusat sebagai akibat desentralisasi, di sarankan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penetapan alokasi dana dekonsentrasi untuk menghapus dana dekonsentrasi atau menetapkan suatu formula untuk menentukan besarnya alokasi yang akan diberikan pada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah. Menentukan sanksi terhadap ketidak sesuaian pengalokasian dana dekonsentrasi baik pada tahap perencanaan maupun penerapannya..

Kata kunci: Dekonsentrasi, Kebijakan Pemerintah dan pembagian urusan pemerintah

ABSTRAK

Name : Erlina Hartanti
Study Program : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Title : Allocation of Deconcentration Fund of The Ministry Of National
Education committed to the Government's Decree No. 38/3007

This Thesis is talking about the deconcentration fund allocated by The Ministry of National Education, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah in the year of 2009 and its commit to the Government's Rule No 38 / 2007.

This is the quantitative Descriptive analysis by collecting and analyzing the data of deconcentration fund. The data is consist of the allocation to the implementation program and activities in detail and compare it with the ministry of national education authority stated by Government's rule No 38/1007.

The result shows that the deconcentration's fund allocation is not committed to the government's rule No. 38/2007. That is all because the government's education policy, which states the government to allocate its 20% government budget to education is contradictive with the reduce of the Government authority cause by Government's decree No.38/2007. The other reason is because there is no punishment for the uncommitted action.

So that, by considering the reduce of the governments authority, the writer sugest to the person in charge, to eliminate the deconcentration fund. The alternative suggestion is to make a formula to state the deconcentration fund to be given to the province government and create a punishment for any uncommitted action to the rules.

Key words : Deconcentration, Government's policy dan Government's authority.